

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kesempatan Kerja

2.1.1.1 Pengertian Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja adalah keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan kerja untuk para pencari kerja. Kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan pekerjaan dan kesempatan untuk bekerja, yang ada dari suatu kegiatan ekonomi (produksi). Dengan demikian kesempatan kerja adalah lapangan pekerjaan yang sudah diduduki dan masih lowongan.

Kesempatan kerja mencakup lapangan kerja yang sudah diisi. Lowongan pekerjaan mengandung arti adanya kesempatan kerja untuk diisi dan hal ini sering disebut dengan tenaga kerja. Biasanya sulit untuk memperoleh data tentang kesempatan kerja, maka untuk keperluan praktis umumnya jumlah kesempatan kerja dan banyaknya lapangan kerja yang terisi tercermin dari jumlah penduduk yang bekerja (Sofyan, 2021).

Menurut Sumarsono (2003) dalam (Mandak et al., 2022) memberikan definisi bahwa kesempatan kerja adalah lapangan pekerjaan yang sudah diduduki (*employment*) dan masih lowong (*vacancy*). Kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga kerja yang tersedia jika lapangan pekerjaan yang ada mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang ada. Dengan kata lain, kesempatan kerja disini tidak menunjukkan potensi tetapi pada fakta jumlah orang yang bekerja dan jumlah orang yang bekerja termasuk tenaga kerja.

Berbicara mengenai kesempatan kerja maka membicarakan mengenai ketenagakerjaan. Dimana kita juga perlu mengetahui beberapa konsep ketenagakerjaan yang berlaku secara umum (Mulyadi, 2008:59), yaitu:

a. Tenaga Kerja (*manpower*)

Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (15-64-tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

b. Angkatan Kerja (*labor force*)

Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produksi barang dan jasa. Angkatan kerja dapat dirumuskan melalui persamaan sebagai berikut:

$$AK = K + MP.$$

c. Bukan Angkatan Kerja (*unlabour force*)

Bukan angkatan kerja adalah penduduk yang berusia (15-64 tahun), namun dalam kegiatan utamanya selama seminggu yang lalu adalah sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Apabila seorang yang kegiatan utamanya adalah sekolah dan mereka bekerja minimal 1 jam selama seminggu yang lalu, maka individu tersebut tetap termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja. Jumlah usia kerja (UK) dapat dilihat melalui persamaan sebagai berikut:

$$UK = AK + BAK$$

d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (*labour force participation rate*)

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umur sebagai persentase penduduk dalam kelompok umur tersebut, yaitu dengan membandingkan angkatan kerja dengan tenaga kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPAK} = \frac{\text{AK}}{\text{UK}} \times 100\%$$

e. Tingkat Pengangguran (*unemployment rate*)

Tingkat pengangguran adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja sedang aktif mencari pekerjaan, yaitu dengan membandingkan jumlah orang yang mencari pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran (TP) dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{TP} = \frac{\text{MP}}{\text{AK}} \times 100\%$$

Model kesempatan kerja dapat dijelaskan dari dua sudut pandang, yaitu dari teori klasik dan teori Keynes.

a. Teori klasik

Teori klasik mengemukakan pandangan mereka mengenai kesempatan kerja, yaitu bahwa tingkat output dan harga keseimbangan hanya bisa dicapai apabila perekonomian berada pada tingkat kesempatan kerja penuh (*full employment*). Sementara, keseimbangan dengan tingkat kesempatan kerja penuh (*equilibrium with full employment*) hanya bisa dicapai melalui bekerjanya mekanisme pasar bebas.

b. Teori Keynes

Berbeda dengan klasik, menurut pandangan Keynes, kegiatan perekonomian tergantung pada segi permintaan, yaitu tergantung kepada perbelanjaan atau pengeluaran agregat yang dilakukan perekonomian yaitu pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian pada periode tertentu, dan hanya bisa diukur untuk suatu tahun tertentu.

Menurut Asuuri dalam kutipan (Putra, 2012) menjelaskan bahwa produksi didefinisikan sebagai berikut: Produksi adalah segala kegiatan dalam menciptakan dan menambah kegunaan (*utility*) sesuatu barang atau jasa, untuk kegiatan yang mana dibutuhkan faktor-faktor produksi dalam ilmu ekonomi berupa tanah, tenaga kerja, dan skill (*organization managerial and skill*). Menurut (Sumarni, 2010) produksi adalah semua kegiatan dalam menciptakan dan menambah kegunaan barang atau jasa, dimana untuk kegiatan tersebut diperlukan faktor-faktor produksi.

Dari pengertian tentang definisi produk di atas, maka dapat dikatakan bahwa produksi merupakan suatu kegiatan untuk mentransportasikan faktor-faktor produksi, sehingga dapat meninggalkan atau menambah faedah dalam bentuk waktu dan tempat suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia yang diperoleh melalui pertukaran.

Dalam bidang ekonomi, produksi mempunyai arti yang lain yaitu:

- a. Mendapatkan barang yang disediakan oleh alam, seperti hasil tambang, hasil laut dan hasil hutan. Kegiatan tersebut termasuk kegiatan produksi bidang ekstraktif.
- b. Mengajarkan atau mengolah tanah, seperti pertanian dan perkebunan termasuk kegiatan produksi bidang industri.
- c. Mengolah bahan mentah menjadi bahan baku atau barang jadi, merupakan kegiatan produksi bidang industri.
- d. Mengumpulkan dan menyalurkan, serta memasarkan hasil produksi ke tempat-tempat yang dibutuhkan, termasuk kegiatan produksi bidang perdagangan.
- e. Menghasilkan atau menyediakan jasa, seperti asuransi, dan jasa perhotelan termasuk kegiatan produksi bidang jasa.

Demikian ternyata produksi merupakan kegiatan dimana barang dan jasa tersebut memiliki guna (utilitas). Setiap barang memiliki nilai guna yang berbeda. Produksi merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan erat dengan kegiatan ekonomi. Melalui proses produksi bisa di hasilkan berbagai macam-macam barang yang dibutuhkan oleh manusia.

2.1.2 Inflasi

2.1.2.1 Pengertian Inflasi

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga barang secara terus menerus atas suatu keadaan perekonomian yang menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan tingkat harga secara umum (*Price Level*). Dikatakan tingkat harga umum karena barang dan jasa yang ada dipasaran mempunyai jumlah dan jenis yang sangat beragam sehingga Sebagian besar dari harga-harga barang tersebut selalu meningkat dan mengakibatkan terjadinya inflasi.

Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Sehingga inflasi itu sendiri adalah kenaikan dalam negeri secara terus-menerus dan membuat harga melonjak tinggi. Kejadian inflasi akan mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini terjadi dikarenakan dalam inflasi akan terjadi penurunan tingkat pendapatan Sukirno (2011:165).

Sedangkan menurut (Boediono, 2014:161) inflasi adalah suatu gejala dimana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus. Kenaikan harga dari satu dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain.

Inflasi merupakan salah satu indikator perekonomian yang penting, laju pertumbuhannya selalu diupayakan rendah dan stabil agar tidak menimbulkan penyakit makro ekonomi yang nantinya akan memberikan dampak ketidakstabilan dalam perekonomian (Susanto dan Pangesti 2021). Laju inflasi merupakan tingkat perubahan harga secara umum untuk berbagai

jenis produk dalam rentang waktu tertentu, misalnya per bulan, per triwulan atau per tahun. Indikator untuk menghitung laju inflasi adalah indeks harga konstan (*consumer price index*). *Consumer Price Index* (CPI) merupakan indikator yang umum digunakan untuk menggambarkan pergerakan harga. CPI berupa data yang mengukur rata-rata peubah harga yang dibayarkan oleh konsumen (dalam rata-rata) untuk sekelompok barang dan jasa tertentu. IHK dapat digunakan untuk mengukur inflasi bulanan triwulan, semesteran dan tahunan. Perhitungan laju pertumbuhan dengan proksi IHK dapat dirumuskan sebagai berikut;

$$LI_t = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana:

LI_t = laju inflasi pada tahun t

IHK_t = indeks harga konsumen pada tahun t

IHK_{t-1} = indeks harga konsumen pada tahun sebelumnya.

Secara sederhana inflasi adalah kenaikan tingkat harga tahunan. Menurut Adiwarmanto Karim secara umum inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/komoditas atau jasa selama suatu periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komoditas. Menurut Rahardja dan Manurung, Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus.

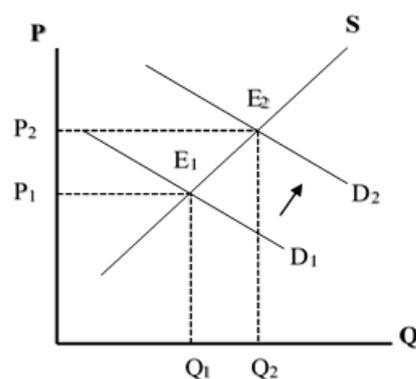
2.1.2.2 Jenis-jenis Inflasi

Menurut Firdaus (2011: 119) berdasarkan tingkat intensitasnya inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Inflasi ringan, yaitu inflasi yang kurang dari 10% per tahun.
2. Inflasi sedang, yaitu inflasi antara 10% sampai 30% per tahun.
3. Inflasi berat, yaitu inflasi antara 30% sampai 100% per tahun.
4. Hiperinflasi, yaitu inflasi yang lebih dari 100% per tahun.

2.1.2.3 Penyebab Inflasi

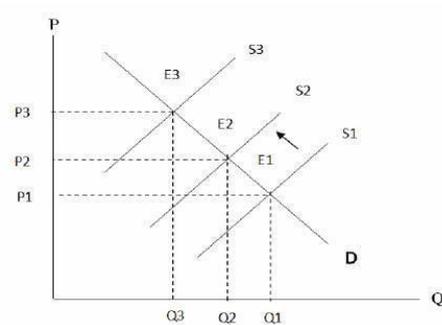
1. *Demand Pull Inflation*, pengaruh permintaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah penawaran produksi akan mengakibatkan inflasi. Sehingga dengan begitu mengakibatkan permintaan banyak sementara penawaran tetap maka harga akan naik sesuai dengan hukum permintaan. Apabila hal ini terjadi secara terus menerus maka akan mengakibatkan inflasi yang berkepanjangan.



Sumber: Researchgate.net

Gambar 2.1 Kurva Demand Pull Inflation

2. *Cost push inflation*, kenaikan biaya input atau biaya faktor produksi yang disebabkan karena naiknya biaya produksi sehingga menyebabkan inflasi. Akibat adanya kenaikan faktor produksi, terdapat dua hal yang dapat dilakukan oleh produsen, diantaranya yaitu menaikkan harga produk dengan jumlah penawaran yang sama atau bisa juga harga produknya naik karena jumlah produksi.



Sumber: Researchgate.net

Gambar 2.2 Kurva Cost Push Inflation

3. *Battle Neck Inflation*, inflasi ini disebabkan karena adanya faktor penawaran dan permintaan. Jika karena adanya faktor penawaran maka persoalannya masih banyak yang dapat menimbulkan inflasi. Selain itu inflasi karena faktor permintaan disebabkan karena adanya likuiditas yang lebih banyak, baik berasal dari sisi keuangan ataupun akibat tingginya ekspektasi terhadap permintaan baru.

2.1.2.4 Teori Inflasi

1. Teori Kuantitas (Persamaan pertukaran dari Irving Fisher $MV=PQ$)
Menurut teori ini penyebab utama inflasi adalah adanya kenaikan jumlah uang beredar dimana inflasi akan terjadi jika ada penambahan jumlah

uang yang beredar, baik penambahan uang kartal maupun uang giral. Serta psikologi atau harapan dari masyarakat tentang kenaikan harga barang, maka tidak ada lagi kecenderungan untuk menyimpan dalam uang tunai melainkan ke harta kekayaan barang.

2. Teori Keynes

Dalam teori ini menjelaskan bahwa inflasi terjadi karena suatu masyarakat cenderung ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Dimana permintaan barang melebihi jumlah yang tersedia. Dan menurutnya kenaikan harga tidak hanya ditentukan oleh kenaikan jumlah uang beredar saja, namun juga disebabkan oleh biaya produksi.

3. Teori Strukturalis

Menurut teori ini dua hal yang dapat menyebabkan inflasi yaitu ketegaran persediaan bahan makanan dan barang-barang ekspor.

2.1.3 Belanja Modal

2.1.3.1 Pengertian Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Adapun menurut penelitian Dewi (2006) dan Syaiful (2008) bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari

satu periode, termasuk pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas, dan kualitas asset.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan, dan mesin, gedung, dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan serta aset tetap lainnya.

Menurut (BPS, 2020) belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun. Pengeluaran yang ditujukan untuk biaya pembangunan baik berupa pembangunan fisik seperti: jalan, jembatan, gedung dan pemeliharaan pembangunan. Model Rostow dan Musgrave terdapat tiga tahapan: 1) Tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah besar untuk menyediakan fasilitas dan pelayanan publik. 2) Tahap menengah terjadi pembangunan ekonomi, investasi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peran swasta juga semakin besar. 3) Aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran aktivitas sosial. Teori Adolf Wagner ketika pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat karena pemerintah harus mengatur hubungan dalam masyarakat, pendidikan, hukum, rekreasi, kebudayaan (Prasetyo, 2012).

Belanja modal adalah suatu pengeluaran yang dilakukan untuk menambah aset tetap atau investasi yang ada sehingga akan memberikan manfaatnya tersendiri pada periode tertentu. Dalam hal tersebut masuk dalam pembukuan akuntansi dengan kata lain belanja modal akan mempengaruhi posisi keuangan (Kartini, 2019).

2.1.3.2 Indikator Belanja Modal

Abdullah (2008) menjelaskan bahwa belanja modal pada umumnya berasal dari dana bantuan (*fund*), dana bantuan pemerintah yang selalu dialokasikan untuk membiayai belanja modal adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Secara keseluruhan jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekurang-kurangnya 29% dari belanja daerah sesuai amanat Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya alokasi belanja modal pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu :

1. Kelemahan perencanaan belanja pemerintah daerah.

Proporsi alokasi belanja daerah masih didominasi kepentingan operasional rutin pemerintahan dibandingkan dengan alokasi belanja untuk kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan publik. Hal ini tentunya mempengaruhi besarnya anggaran belanja modal pemerintah daerah.

2. Ketersediaan sumber-sumber dana belanja daerah.

Pendapatan daerah dan pembiayaan merupakan sumber-sumber dana belanja daerah. Apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbatas untuk membiayai belanja daerah, maka diperlukan adanya bantuan dana transfer dari pemerintah pusat untuk membantu pendanaan belanja daerah dan menggunakan dana pembiayaan bila terjadi defisit anggaran. Namun tidak tersedia sumber-sumber dana belanja daerah yang cukup maka sangat riskan untuk bisa menyediakan anggaran yang besar, khususnya untuk belanja modal.

3. Luasnya daerah yang perlu dikembangkan dan dibangun.

Daerah yang padat pembangunan tentunya tidak membutuhkan alokasi belanja modal yang banyak. Pengalokasian dana pemeliharaanlah yang perlu ditingkatkan. Namun bagi daerah yang baru dimekarkan tentunya membutuhkan alokasi dana yang sangat besar pada belanja modalnya, karena membutuhkan banyak pembenahan, pembangunan, penyediaan sarana, dan prasarana publik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan belanja modal dapat secara langsung mempengaruhi produktivitas faktor-faktor lain yang dapat merangsang peningkatan *output* ekonomi dan secara tidak langsung terkait dengan eksternalitas. Adanya infrastruktur yang berkualitas maka dapat mengurangi biaya ketergantungan terhadap sektor swasta seperti penyediaan air bersih, listrik maupun jalan. Pengeluaran biaya daerah ke sektor swasta juga dapat dikurangi melalui

peningkatan modal manusia dan produktivitas tenaga kerja sebagai hasil atas investasi publik.

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 bahwa belanja modal diklasifikasikan dalam lima kategori utama diantaranya:

1. Belanja Modal Tanah

Pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/penyelesaian, balik nama, dan sewa tanah, pengosongan, pengurungan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, peningkatan kapasitas peralatan, dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan sampai peralatan dan mesin dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung, dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/peningkatan pembangunan, pembuatan, dan perawatan serta untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan irigasi, dan jaringan dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik lainnya

Pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/peningkatan pembangunan, pembuatan, dan perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria. Belanja modal dialokasikan dengan harapan agar terdapat *multiplier effect* (efek jangka panjang) baik secara makro dan mikro bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah aset tetap yang dimiliki oleh daerah. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Karena pada dasarnya belanja modal merupakan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Ukuran keberhasilan dari pemanfaatan belanja modal sendiri adalah tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat harga (Halim, 2008).

2.1.3.3 Teori Belanja Modal

1. Teori Harrod-Domar.

Harrod-Domar mempertahankan pendapat dari para ahli ekonomi sebelumnya yang merupakan gabungan dari pendapat kaum klasik dan Keynes, dimana beliau menekankan peranan pertumbuhan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dimana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang-barang dan atau jasa yang lebih besar (Sadono, 2007: 256-257).

2. Teori Rostow dan Musgrave

Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahapan-tahapan pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, menurut mereka rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal ini dikarenakan pada tahap ini persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sehingga pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Namun pada

tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang semakin rumit. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, menimbulkan semakin tingginya tingkat pencemaran udara dan air sehingga pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi itu terhadap masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pada tahap lanjut, Rostow berpendapat bahwa pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran untuk layanan sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pendidikan, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya. Sementara itu, Dalam satu proses pembangunan menurut Musgrave, rasio investasi swasta terhadap GNP semakin besar. Tetapi rasio investasi pemerintah terhadap GNP akan semakin kecil. Teori Rostow dan Musgrave adalah pandangan yang timbul dari pengamatan atas pengalaman pembangunan ekonomi yang dialami banyak negara tetapi tidak disadari oleh suatu teori tertentu. Selain tidak jelas apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap atau beberapa tahap dapat terjadi secara simultan (Dumairy, 1997: 163).

4. Teori Adolf Wagner (Hukum Wagner)

Pengamat empiris oleh Adolf Wagner terhadap negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke 19 menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat. Wagner mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap PDB dengan mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap PDB. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah ada 5 hal yaitu tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi, perkembangan demokrasi dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan (Dumairy,1997: 161-162).

2.1.4 *Human Capital*

2.1.4.1 *Pengertian Human Capital*

Human capital adalah kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian yang dimiliki oleh karyawan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi perusahaan (Pramudita

2012). Apabila *human capital* dapat diolah dan dimanfaatkan dengan baik, maka *human capital* akan menjadi sumber daya kunci perusahaan (Kusumo, 2012). *Human capital* merupakan faktor yang penting dalam proses produksi karena sumber daya manusia merupakan aset yang penting dalam suatu perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan (Dahlan, 2014). *Human capital* mencerminkan kemampuan kolektif perusahaan untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut, dimana akan meningkat jika perusahaan mampu menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawannya. *Human capital* merupakan pengelompokan tiga elemen kunci, yaitu kecakapan, sikap, dan kecerdasan intelektual. Dalam beberapa tahun terakhir, pengetahuan telah datang untuk diakui sebagai faktor produksi (modal pengetahuan) yang berdiri sendiri, dan berbeda dari tenaga kerja. Modal pengetahuan merupakan suatu kemampuan (*know-how*) hasil dari pengalaman, informasi, pengetahuan, pembelajaran, dan keterampilan anggota dari sebuah organisasi. Dari semua faktor-faktor produksi, modal pengetahuan menciptakan keunggulan kompetitif terlama dan abadi.

Gaol (2014) menyatakan bahwa *human capital* merupakan pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*expertise*), kemampuan (*ability*) dan keterampilan (*skill*) yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu perusahaan. Dengan mengandalkan keahlian, kemampuan dan keterampilan maka seorang SDM dapat menjalankan sumber daya yang lainnya. Menurut Becker (1992) dalam Deni Minarso (2018), modal manusia (*human capital*) adalah bahwa manusia bukan sekedar sumber daya namun merupakan modal (*capital*) yang menghasilkan

pengembalian (*return*) dan setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kualitas dan kuantitas modal tersebut merupakan kegiatan investasi.

Perbedaan konsep antara modal manusia dengan sumber daya manusia, yang mana modal manusia adalah kemampuan, kesehatan, cita-cita dan sebagainya yang merupakan hasil pembelanjaan di bidang pendidikan, penyediaan serta pengembangan programi pelatihan kerja, dan sebagainya. Sedangkan sumber daya manusia adalah kuantitas kualitas tenaga kerja di suatu negara. Modal manusia merupakan salah satu peran vital dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pencapaian pertumbuhan ekonomi adalah tergantung pada peningkatan fisik modal dan modal alam. Selain dua itu modal, modal manusia juga menjadi kunci penting untuk meningkatkan produktivitas (Setyadi et al., 2020)

2.1.4.2 Peranan *Human Capital*

Peranan *human capital* dalam mencapai outcomes diharapkan dapat menentukan kesejahteraan hidup. Proses dalam pembentukan *human capital* sangatlah menarik untuk dianalisis. Fitz-enz (2009: 78) menyatakan pentingnya tiga aspek dalam mempersiapkan sumber daya manusia sebagai *human capital*, diantaranya:

1. Memahami kebutuhan pelanggan (*outcomer*), dalam *sector public*, tentunya *customer* yang dimaksud adalah masyarakat.

2. Menetapkan kompetensi dan berapa besar peranan sumber daya manusia dalam memainkan fungsinya dalam pelayanan kepada masyarakat tersebut.
3. Mengembangkan rantai kapabilitas yang berkesinambungan dalam penyediaan sumber daya manusia baik dan aspek kualitas dan kuantitas untuk mendukung peranan yang telah ditentukan tersebut.

2.1.4.3 Komponen *Human Capital*

Chr Jimmy L.Gaol (2014: 698) perkembangan dunia bisnis sekarang ini, manusia tidak hanya dijadikan sebagai salah satu sumber daya (mesin, uang, material atau bahan-bahan, informasi (termasuk data), dan (personil) tetapi juga sebagai penggerak sumber daya lainnya. Mayo (2000), human capital memiliki lima komponen, yaitu:

1. Kemampuan Individual (*Individual capability*)

Kemampuan adalah kecakapan atau potensi seseorang individu untuk menguasai keahlian dalam melakukan atau mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan atau suatu penilaian atas tindakan seseorang.

2. Motivasi Individual (*Individual motivation*)

Motivasi individu adalah motivasi yang timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri.

3. Kepemimpinan (*Leadership*)

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

4. Suasana Organisasi (*The organizational climate*)

Suasana organisasi adalah nilai-nilai kekeluargaan yang selalu ditanamkan dalam hubungan personal yang berupa semangat kompetitif yang selalu dipelihara untuk meraih prestasi kerja yang tinggi.

5. Efektivitas Kelompok Kerja (*Work group effectiveness*)

Efektivitas kelompok kerja adalah pencapaian sasaran organisasi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Manusia sebagai salah satu aset perusahaan yang berwujud, selain gedung, mesin dan uang, menjadi penggerak sumber daya lainnya, baik yang berwujud (mesin, uang, material atau bahan) dan yang tidak berwujud (informasi atau data),

2.1.5 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

2.1.5.1 Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri adalah perseorangan atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. Kebijakan tentang rencana Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ditetapkan oleh pemerintah melalui UU No. 6 Tahun 1968, kemudian disempurnakan dengan diberlakukannya UU No. 12 Tahun 1970. Rencana Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang disetujui pemerintah adalah nilai investasi baru, perluasan, dan alih status, yang terdiri atas modal sendiri dan

modal pinjaman. Jumlah kumulatif rencana Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah jumlah seluruh rencana Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang disetujui pemerintah sejak tahun 1968 dengan memperhitungkan pembatalan, perluasan, perubahan, penggabungan, pencabutan, dan pengalihan status dari Penanaman (PMDN) ke PMA atau sebaliknya.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagai sumber domestik merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi nasional. Di satu pihak, ia mencerminkan permintaan efektif, dilain pihak ia menciptakan efisiensi produktif bagi produksi di masa depan. Proses penanaman modal ini menghasilkan output nasional dalam berbagai cara. Investasi dibidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga meningkatkan tenaga kerja. Pembentukan atau penanaman modal ini akan membawa menuju kearah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi membawa kearah spesialisasi dan penghematan produksi skala luas. Jadi, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menghasilkan kenaikan besarnya output nasional, pendapatan dan pekerjaan, dengan demikian memecahkan masalah inflasi dan neraca pembayaran. Serta membuat perekonomian bebas dari beban utang luar negeri. Sumber yang dapat diarahkan untuk pembentukan modal adalah kenaikan pendapatan nasional, pengurangan konsumsi, penggalakan tabungan, pendirian lembaga keuangan, menggerakkan simpanan emas, meningkatkan keuntungan, langkah-langkah fiskal dan moneter dan sebagainya. Sumber domestik yang paling efektif yaitu tabungan. Tabungan pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam pembentukan modal.

2.1.5.2 Manfaat Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Manfaat Penanaman Modal Dalam Negeri, adalah sebagai berikut:

1. Mampu menghemat devisa
2. Mengurangi ketergantungan terhadap produk asing
3. Mendorong kemajuan industri dalam negeri melalui keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang
4. Memberikan kontribusi dalam upaya penyerapan tenaga kerja

2.1.5.3 Fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Dalam kegiatan penanaman modal dalam negeri pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal dapat berupa (Undang-Undang No. 25 Tahun 2007):

1. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu.
2. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi dalam negeri.
3. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan masuk atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu.
4. Pembebasan atau penanguhan pajak pertambahan nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu.

5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat.

Keringanan pajak bumi dan bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

2.1.6 Corona Virus Disease (Covid-19)

2.1.6.1 Konsep Covid-19

Covid-19 merupakan virus yang dapat menyebabkan penyakit menular dan fatal, serta menyerang manusia dan mamalia lain hingga ke paru-paru di saluran pernapasan. Biasanya penderita Covid-19 akan mengalami demam, radang tenggorokan, pilek atau bahkan batuk, yang bahkan dapat menimbulkan gejala awal pneumonia, virus ini dapat menyebar melalui kontak dekat dengan penderita cairan pernafasan dan Covid-19. Tubuh pasien saat batuk atau air liur (Salam, 2020). Covid-19 yang juga dikenal sebagai virus corona oleh masyarakat merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan. Coronavirus dapat menyebabkan penyakit pernafasan dan kematian akibat pneumonia akut. Ini adalah jenis virus baru yang dapat menyebar ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, termasuk bayi, anak-anak, dewasa, dan lanjut usia. Virus ini bernama Covid-19 yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019. Virus ini menyebar dengan cepat dan menyebar di belahan China lainnya bahkan di banyak negara termasuk Indonesia (Sarmigi, 2020).

2.1.6.2 Dampak Covid-19

Dampak yang ditimbulkan dari Covid-19 munculnya penyakit Corona ini menimbulkan banyak dampak. Tidak hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia merasakan dampaknya. Pandemi *virus corona* yang menyebabkan Covid-19

semakin menghantam ekonomi global. Akibat wabah ini, banyak pabrik dan departemen lain mengalami kesulitan. Alhasil, pemerintah menutup semua aktivitas luar ruangan untuk mencegah penyebaran virus ini. Selain itu, yang ingin berpergian harus menggunakan alat pelindung diri seperti masker (Fatimah, 2020). Pemerintah juga telah melakukan isolasi sosial untuk mengurangi dampak kebijakan yang telah dikeluarkan, dan pemerintah juga telah melakukan serangkaian persiapan intensif untuk menjaga daya beli masyarakat. Saya pikir ini adalah langkah yang bagus. Pemerintah sebaiknya berkonsentrasi dan menghentikan penyebaran corona. Pemerintah juga memberikan bantuan, antara lain peningkatan PKH, kartu sembako, penambahan kartu pra kerja, pembebasan tagihan listrik, perumahan intensif, pajak, dll (Sarmigi, 2020).

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian-penelitian terdahulu ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan ataupun kajian terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitiann	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sinta Ariska, Sri Ulfa Sentosa, Dewi Zaini Putri (2021) Pengaruh Inflasi, pendidikan	Inflasi, pendidikan, dan kesempatan kerja	Kemiskinan, belanja modal dan PMDN	Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesempatan kerja di Indonesia. Pendidikan berpengaruh negatif tidak signifikan	JKEP: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan, Volume 3, Nomor 3, September 2021, Hal 77-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dan Upah Terhadap Kesempatan Kerja dan Kemiskinan di Indonesia			terhadap kesempatan kerja.	88
2	Agam Nurhardiansyah, Nanik Istiyani, Fajar Wahyup (2017) Pengaruh IPM, PDRB, UMP dan Inflasi Terhadap Kesempatan Kerja di Pulau Jawa Tahun 2006 – 2015	Inflasi dan kesempatan kerja	IPM, PDRB, UMP, belanja modal, human capital, dan PMDN	IPM dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. UMP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja.	Journal Ekuilibrium, 2017, Volume II (2) : 56 – 61
3.	Glenn Yericko Sondakh, Agnes L. Ch. P. Lapian, Hanly F. Dj Siwu (2017) Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah Dan Investasi Swasta terhadap Kesempatan Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado (Tahun 2006-2015)	Belanja modal pemerintah daerah dan kesempatan kerja	Investasi Swasta, pertumbuhan ekonomi, inflasi, human capital dan PMDN	Hubungan positif dan signifikan antara investasi pemerintah dan swasta terhadap peningkatan kesempatan kerja yang juga mengurangi tingkat pengangguran. Begitupun dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kota Manado.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 17 No. 01 Tahun 2017
4.	Gabriella Igir, Debby	Belanja modal,	Belanja sosial,	Berpengaruh positif dan tidak signifikan	Jurnal Berkala

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Ch. Rotinsulu, Krest D. Tolosang (2022) Pengaruh Belanja Modal, Belanja Sosial Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja Di Kabupaten Minahasa Selatan	Investasi, dan kesempatan kerja	Inflasi, human capital dan PDRB	Pada Belanja Modal terhadap Kesempatan Kerja. Secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan Investasi terhadap Kesempatan Kerja. Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan pada pengaruh belanja modal, belanja sosial dan investasi terhadap Kesempatan kerja	Ilmiah Efisiensi Volume 22 No.2 Maret 2022
4.	Gabriella Igir, Debby Ch. Rotinsulu, Krest D. Tolosang (2022) Pengaruh Belanja Modal, Belanja Sosial Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja Di Kabupaten Minahasa Selatan	Belanja modal, investasi, dan kesempatan kerja	Belanja sosial, inflasi, human capital dan PDRB	Berpengaruh positif dan tidak signifikan pada Belanja Modal terhadap Kesempatan Kerja. Secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan Investasi terhadap Kesempatan Kerja. Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan pada pengaruh belanja modal, belanja sosial dan investasi terhadap Kesempatan kerja	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 22 No.2 Maret 2022
5.	Luh Triska Widiani I Sudarsana Arka (2019) Pengaruh Belanja Modal Dan Investasi Swasta Terhadap Kesempatan	Belanja modal, investasi swasta, dan kesempatan kerja	Kesejahteraan masyarakat, inflasi, dan human capital	Kesempatan kerja tidak memediasi pengaruh belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali sementara itu, kesempatan kerja memediasi	E-JURNAL EKONOMI PEMBANG UNAN UNIVERSITAS UDAYANA Vol. 10 No 1 JANUARI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali			pengaruh investasi swasta terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.	
6.	Abdurrahman Sang (2016) Pengaruh Human Capital dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesempatan Kerja di Sumatera Selatan.	Pendidikan dan kesempatan kerja	Angkatan kerja, pekerja, pertumbuhan ekonomi, Pekerjaan, belanja modal inflasi dan PMDN	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap lapangan kerja di Sumatera Selatan. pendidikan berpengaruh positif terhadap lapangan kerja.	<u>Vol. 1 No. 2 (2016):</u> PARAMETER
7.	Rika Sadariawati (2006) Pengaruh Human Capital Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja Di Sumatera Selatan	Pendidikan, angkatan kerja, dan kesempatan kerja	Pertumbuhan ekonomi, inflasi, belanja modal, dan PMDN	Hasil menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Sumatera Selatan, pendidikan berpengaruh positif terhadap pekerjaan.	Kajian Ekonomi, 2010 - ejournal.unsri.ac.id
8.	Eliza (2016) Analisis Pengaruh PMDN dan PMA terhadap Kesempatan Kerja di Indonesia	PMDN dan kesempatan kerja	PMA, inflasi, belanja modal dan human capital	PMDN dan PMA melakukan pengujian secara parsial dan simultan berpengaruh baik dan signifikan terhadap peluang kerja di Indonesia.	Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi, Volume I, Nomor 01, Mei – Oktober 2016
9.	Irwan Pirda Atmi Danisa (2019) Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri Dan	Penanaman Modal Dalam Negeri, dan kesempatan kerja	PMA belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi	PMDN dan PMA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesempatan kerja. PMDN berpengaruh positif tidak	Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penanaman Modal Asing Serta Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesempatan Kerja Di Provinsi Kalimantan Timur			signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kesempatan kerja PMA berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kesempatan kerja melalui Pertumbuhan ekonomi	
10.	Ahmad Nur Alipullah, Sofia Ulfa Eka Hadiyanti (2019) Pengaruh Investasi Penanaman Modal dalam Negeri Terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Kalimantan Timur	PMDN dan Kesempatan kerja	Inflasi, belanja modal dan human capital	PMDN pada sektor-sektor ekonomi yang ada maka ada pengaruh PMDN terhadap kesempatan kerja	Borneo Student Research
11.	Siestri Pristina Kairupan (2013) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi Dan Belanja Daerah Pengaruhnya Terhadap Kesempatan Kerja Di			Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif, belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan, tingkat inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesempatan kerja di	<i>Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1(4).</i>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sulawesi Utara Tahun 2000-2012			Provinsi Sulawesi Utara	
12.	Deyana Desideria, Purwaka Hari Prihanto, Hardiani (2019) Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, belanja daerah, inflasi dan upah terhadap kesempatan kerja di Provinsi Jambi	Kesempata n Kerja	Investasi, Belanja Daerah, upah	Inflasi dan Upah berpengaruh signifikan terhadap Kesempatan kerja. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja Provinsi Jambi.	<i>e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan,</i> 8(2), 121- 135.
13.	Endah Kurnia Lestari, Sunlip Wibisono, Sa'bandianto (2022) Pengaruh Besaran Perekonomia n, Tingkat Upah dan Inflasi Terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014- 2018	Inflasi, Kesempata n Kerja	Tenaga Kerja, PDRB, Tingkat Upah,	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDRB (X1) berpengaruh signifikan dengandhubungan positif terhadap TPAK, variabel Upah Minimum (X2) berpengaruh signifikan dan negatif. melawan TPAK. Kesempatan kerja di pulau Jawa dipengaruhi oleh 99,6% oleh IPM, PDRB, UMP dan inflasi sedangkan sisanya 0,4% dipengaruhi	<i>Jurnal Ekuilibrium,</i> 6(1), 13-25.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				oleh faktor lain.	
14.	Angely C.MSuatan, AmranT.Nau koko, Ita Pingkan F.Rorong (2023) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi Dan Jumlah Industri Terhadap Kesempatan Kerja Di Kota Manado	Inflasi dan kesempatan kerja	Pertumbuhan ekonomi, jumlah industri	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Kota Manado, jumlah industri berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesempatan kerja di Kota Manado. Secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kesempatan kerja di Kota Manado.	<i>Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi</i> , 23(4), 73-84.
15.	Muhammad Zaky Agung, Dewi Rahmi (2023) Pengaruh Ekspor, Investasi PMDN, dan Investasi PMA Terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Barat Tahun 2007-2021	PMDN dan kesempatan kerja	Tenaga Kerja, Ekspor, dan Investasi PMA	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel investasi PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Provinsi Jawa Barat Tahun 2007-2021.	<i>Conference Series: Economics Studies (Vol. 3, No. 1, pp. 1-8)</i> .

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, penelitian ini didasarkan dengan kerangka pemikiran sebagai berikut:

2.3.1 Hubungan Inflasi dengan Kesempatan Kerja

Tingkat inflasi mempunyai dampak yang baik atau negative ada peluang kerja. Jika tingkat inflasi yang di tentukan adalah inflasi harga secara keseluruhan, tingkat inflasi yang tinggi akan menyebabkan suku bunga naik (pinjaman). Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang lain. Kenaikan harga karena musiman, menjelang hari hari besar atau terjadi satu kali saja (dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan) tidak disebut inflasi.

Menurut Sukirno 2004, Dengan naiknya permintaan agregat, berdasarkan teori permintaan, permintaan akan naik, kemudian harga akan naik pula. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja tenaga kerja merupakan satu satunya input yang dapat meningkatkan output. Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesempatan kerja. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Sinta Ariska, Ulfa Sentosa, dan Dwi Zaini Putri (2021).

2.3.2 Hubungan Belanja Modal dengan Kesempatan Kerja

Belanja modal pemerintah secara umum dialokasikan untuk membangun sarana-prasarana yang selanjutnya diharapkan dapat mempertinggi intensitas kegiatan ekonomi serta merangsang pihak swasta untuk berinvestasi. Kenaikan

aktivitas ekonomi kemudian diharapkan mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Selain itu, belanja modal pemerintah dan investasi swasta dalam pelaksanaannya memerlukan tenaga kerja, hal tersebut sangat memungkinkan untuk banyak orang yang bekerja dan memperoleh penghasilan, yang pada akhirnya dapat menyelesaikan tantangan utama pembangunan yaitu memperbaiki kualitas kehidupan.

Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja (Asiri dkk, 2016). Hal tersebut sejalan dengan penelitian Laksmi (2013), Lopian (2017). Belanja atau pengeluaran pemerintah daerah tidak hanya dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan operasional pemerintahan di daerah, tetapi melalui belanja daerah pemerintah dituntut untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Amri, 2017). Keberadaan belanja modal dalam anggaran daerah antara lain dimaksudkan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun, seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Tidak hanya itu, pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk belanja modal juga bersifat investasi sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesempatan kerja (Amri dan Aimon, 2017). Adanya keterkaitan antara belanja modal dengan perluasan kesempatan kerja seperti dikemukakan oleh Moudud (1999) bahwa peningkatan belanja pemerintah terutama dalam bentuk belanja modal diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja. Temuan penelitian Fouladi (2010) di Iran juga memberikan bukti empiris bahwa pengeluaran pemerintah dapat memperluas kesempatan kerja.

Mengacu pada uraian di atas jelaslah bahwa belanja pemerintah dalam bentuk belanja modal dapat memperluas kesempatan kerja dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Semakin besar alokasi anggaran daerah dalam bentuk belanja modal semakin luas kesempatan kerja.

2.3.3 Hubungan *Human Capital* dengan Kesempatan Kerja

Human Capital yang baik dalam hal ini pendidikan yang ditempuh oleh seseorang, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi memberikan pengaruh yang positif terhadap peluang untuk di terima bekerja (Kesempatan Kerja). Seseorang dengan tingkat pendidikan yang baik diharapkan mempunyai kemampuan, dasar ilmu pengetahuan dan wawasan yang cukup, sesuai dengan standar pendidikan yang dimilikinya. Orang yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi, akan lebih mudah untuk mencari, menyerap, bertukar informasi, melakukan migrasi, jika diasumsikan semua faktor yang terkait mendukung atau tersedia seperti fasilitas dan infrastruktur, sehingga akses untuk mencari informasi tentang pekerjaan akan lebih mudah dilakukan.

Hal ini juga sejalan dengan teori yang dikemukakan Connel (1999;281) bahwa orang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi akan lebih mudah mencari informasi untuk pekerjaan dan lebih fleksibel untuk bermigrasi karena mempunyai kualifikasi yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang berpendidikan lebih rendah sehingga dapat disimpulkan peningkatan pendidikan atau pendidikan yang lebih baik yang dimiliki seseorang akan meningkatkan peluang kerja yang bisa diperolehnya.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penemuan Carnevalle (2002:18), Hal yang hampir sama dikemukakan oleh Son (2007:1) bahwa orang yang berpendidikan lebih baik cenderung mempunyai tingkat *employment rate* yang lebih tinggi, penghasilan yang lebih tinggi dan menghasilkan output yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan orang yang berpendidikan lebih rendah. Hal ini merupakan alasan yang rasional yang cukup kuat bagi pemerintah dan rumah tangga (*private household*) untuk menginvestasikan sebagian dari penghasilan mereka untuk pendidikan dengan ekspektasi memperoleh *benefit* yang lebih tinggi pada masa yang akan datang. Dalam konteks ini pendidikan dianggap sebagai suatu investasi yang akan membuat seseorang dilengkapi dengan ilmu pengetahuan dan keahlian yang memperbaiki kemampuan untuk dipekerjakan (*employability*) dan produktif yang akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi di masa yang akan datang.

Pengetahuan yang lebih yang dimiliki seseorang memungkinkan dirinya untuk berkompetisi di pasar kerja sehingga peluang untuk diterima bekerja akan semakin besar. Oleh karena itu pendidikan (*human capital*) berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja yang bisa diperoleh seseorang. Semakin banyak orang yang bekerja maka akan meningkatkan output dan sebagai multiplier efeknya adalah akumulasi dari pendapatan yang dikeluarkan untuk keperluan konsumsi, investasi, pajak dan hal-hal lain yang berkaitan akan bertambah.

2.3.4 Hubungan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Kesempatan Kerja

Investasi dalam negeri (PMDN) memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap Kesempatan Kerja. Hal ini disebabkan jumlah proyek yang diinvestasikan oleh investor dalam negeri, sehingga tenaga kerja yang terserap jumlahnya menjadi sedikit. Untuk itu pemerintah diharapkan dapat bekerjasama dengan instansi yang terkait agar memberikan kemudahan atau fasilitas kepada para investor asing agar lebih tertarik menginvestasikan modalnya pada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Dengan besarnya investasi yang ditanamkan di perusahaan-perusahaan, maka terciptalah proyek-proyek baru yang mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak.

Peningkatan kesempatan kerja mempunyai hubungan yang kuat dengan investasi dalam negeri (PMDN) maupun investasi luar negeri (PMA) untuk memajukan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara positif karena dengan semakin meningkatnya investasi, maka akan mengakibatkan kesempatan kerja dan pendapatan negara, sehingga pembangunan akan berjalan dengan baik. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian Eliza (2016).

2.3.5 Hubungan Covid-19 dengan Kesempatan Kerja

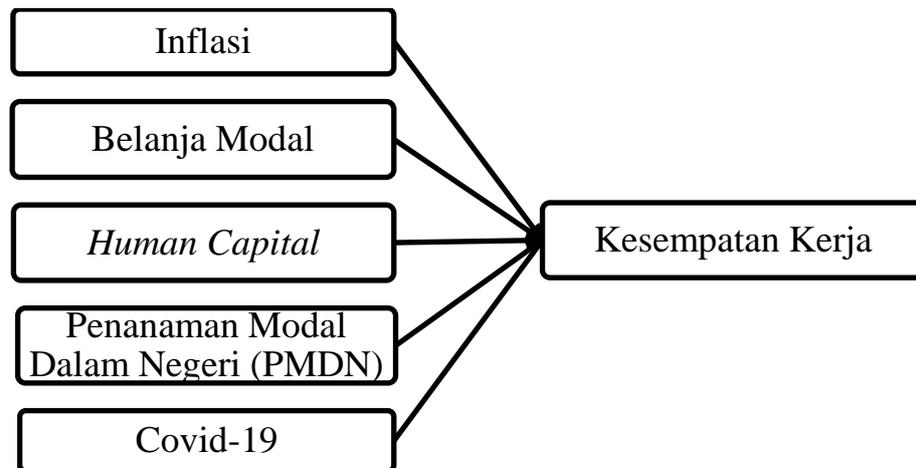
Pandemi global Covid-19 telah menyebabkan pelambatan aktivitas ekonomi dunia, termasuk di Indonesia, yang berdampak terhadap penurunan penciptaan kesempatan kerja dan besarnya jumlah pekerja yang dirumahkan atau

mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Maka hubungan covid-19 dengan kesempatan kerja adalah negative. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Syahrial, S.Sos.I., SH., M.Si., MH (2020) bahwa covid-19 berpengaruh negatif terhadap kesempatan kerja.

Kerangka pemikiran adalah konsep untuk mengungkapkan dan menentukan persepsi dan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti dengan teori-teori yang telah dipaparkan dalam tinjauan pustaka. Mengacu pada teori yang ada, maka garis besar penelitian ini yaitu melihat hubungan antara modal tetap, tenaga kerja, modal kerja dan teknologi terhadap hasil produksi konveksi *fashion* di Kota Tasikmalaya melalui proses analisis data sebagaimana dapat dilihat dari kerangka teori.

Penulis memandang bahwa modal tetap, tenaga kerja, modal kerja dan teknologi dapat mempengaruhi hasil produksi yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu berupa penyedia bahan baku dan teknologi yang keduanya akan mempengaruhi pada perubahan hasil produksi yang dihasilkan. Semakin banyak modal tetap, tenaga kerja, modal kerja dan teknologi maka akan meningkatkan hasil produksi, karena modal, tenaga kerja, modal kerja dan teknologi tersebut dibutuhkan untuk mengoprasikannya. Namun jika alat produksinya hanya berupa mesin maka kondisinya diperkirakan akan sebaliknya, yaitu mengurangi hasil produksi yang gejalanya saat ini sudah mulai dirasakan di Kota Tasikmalaya.

Untuk memudahkan kegiatan penelitian ini yang akan dilakukan serta bagi memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut merupakan kerangka pemikiran penelitian yang akan di lakukan sebagaimana Gambar 2.3:



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu jawaban sementara atas kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris. Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar atau salah (Sugiyono 2011:64).

Berdasarkan kajian teori yang telah dijelaskan, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1. Diduga secara parsial inflasi, belanja modal, *human capital*, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif, sedangkan covid-19 berpengaruh negatif terhadap kesempatan kerja di Indonesia tahun 2005-2022.
2. Diduga secara bersama-sama inflasi, belanja modal, *human capital*, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan covid-19 berpengaruh terhadap kesempatan kerja di Indonesia tahun 2005-2022.